



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **274/KEP/2019**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2019-2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan seleksi dan menetapkan calon anggota Komisi Informasi sebagaimana tercantum pada Surat Ketua DPRD DIY Nomor 160/06808 tanggal 19 November 2019 perihal Laporan Hasil Seleksi terhadap Calon Anggota Komisi Informasi DIY Periode 2019-2023;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Anggota Komisi Informasi yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Daerah Periode 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Anggota Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019 - 2023, dengan nama sebagai berikut:

No	Nama	Unsur
1.	Moh. Hasyim, S.H., M.H.	Masyarakat
2.	Erniati, S.IP, M.H.	Masyarakat
3.	Sri Surani, S.P.	Masyarakat
4.	Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si	Masyarakat
5.	Agus Purwanta, SKM	Pemerintah

KEDUA : Kepengurusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mekanisme musyawarah oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik;
- c. mendorong badan publik untuk memberikan layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada badan publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- d. mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik dan implementasi keterbukaan informasi publik.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai wewenang:
- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEENAM : Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan laporan secara periodik tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KEDELAPAN : Masa jabatan anggota Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 4 (empat) tahun.
- KESEMBILAN : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **27 NOVEMBER 2019**

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
8. Kepala Badan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
10. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.